

Pengadilan Agama Tulungagung

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2022

Jl. Ir. Soekarno Hatta No 117 Tulungagung - 66261



LAPORAN KEUANGAN

PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2022

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Ir. Soekarno - Hatta No.117

Telp. 0355-336516 Fax. 0355-336121

Tulungagung - Jawa Timur 66261

e-mail : pa.tulungagung@gmail.com

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2014, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Pengadilan Agama Tulungagung adalah salah satu Entitas Akuntansi dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Tulungagung mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, serta informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Tulungagung. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Tulungagung, 25 Juli 2022
Kuasa Pengguna Anggaran,

Airwie S.H.
NIP. 19670228 199303 1 003

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	17
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	23
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	34
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	40
F. Pengungkapan Penting Lainnya	42
VI. Lampiran dan Daftar	

PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Jl. Ir. Soekarno Hatta No. 117 Tulungagung – Jawa Timur 66261
Telp. 0355-336516 Fax.0355-336121 e-mail : pa.tulungagung@gmail.com

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Tulungagung yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 30 Juni 2022 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tulungagung, 25 Juli 2022
Kuasa Pengguna Anggaran,

Alwie, S.H.
NIP.19701281993031003

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Tulungagung per 30 Juni 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2022.

Realisasi Pendapatan Negara per 30 Juni 2022 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 25.578.471,- atau mencapai 202,76 persen dari estimasi Pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 12.022.000,-

Realisasi Belanja Negara per 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp. 4.552.552.369,- atau mencapai 44,30 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 10.276.925.000,-

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2022.

Nilai Aset per 30 Juni 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 27.255.928.263,- yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp. 43.405.200,-; Aset Tetap (neto) sebesar Rp. 27.212.523.063,-; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp. 0,-.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 1.028.081.746,- dan Rp. 26.227.846.517,-.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non-operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai

dengan 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp. Rp. 30.907.163,- sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 5.146.134.523,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp. (5.115.227.360,-). Untuk Kegiatan Non Operasional terdapat surplus sebesar Rp. 1.171,- dan Pos-Pos Luar Biasa sebesar Rp. 0,- sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp. (5.115.226.189,-)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2022 adalah sebesar Rp. 26.816.098.808,- dikurangi Defisit-LO sebesar Rp. (5.115.226.189,-), ditambah Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan sebesar Rp. 0,-, kemudian ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 4.526.973.898,-, mengalami Penurunan Ekuitas sebesar Rp. (588.252.291),- sehingga Ekuitas Akhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah senilai Rp. 26.227.846.517,-

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode 30 Juni 2022 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PER 30 JUNI 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 JUNI 2022		% thd Angg	TA 2021
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	12.022.000	25.578.471	212,76	407.400
JUMLAH PENDAPATAN		12.022.000	25.578.471	212,76	407.400
BELANJA	B.2.				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.3	7.540.509.000	3.074.153.647	40,77	3.559.886.244
Belanja Barang	B.4	1.960.416.000	906.622.791	46,25	833.430.295
Belanja Bantuan Sosial	B.5	-	-	0,00	-
Jumlah Belanja Operasi		9.500.925.000	3.980.776.438	41,90	4.393.316.539
Belanja Modal					
Belanja Tanah	B.6	-	-	0,00	-
Belanja Peralatan dan Mesin	B.7	291.000.000	291.000.000	100,00	37.350.000
Belanja Gedung dan Bangunan	B.8	485.000.000	280.775.931	57,89	-
Belanja Jalan, Irigasi, Jaringan	B.9	-	-	0,00	-
Belanja Modal lainnya	B.10	-	-	0,00	-
Jumlah Belanja Operasi		776.000.000	571.775.931	73,68	37.350.000
JUMLAH BELANJA		10.276.925.000	4.552.552.369	44,30	4.430.666.539

II. NERACA

PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG NERACA PER 30 JUNI 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 JUNI 2021	2020
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	42.000.000	50.000.000
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang PNBP	C.4	135.800	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Pendek	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Persediaan	C.9	1.269.400	1.606.100
Jumlah Aset Lancar		43.405.200	51.606.100
PIUTANG JANGKA PANJANG			-
Tagihan TP/TGR	C.10	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.11	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.12	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.13	19.834.552.000	19.834.552.000
Peralatan dan Mesin	C.14	2.771.596.563	2.479.818.563
Gedung dan Bangunan	C.15	7.085.960.000	7.085.960.000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.16	449.189.000	449.189.000
Aset Tetap Lainnya	C.17	5.552.079	5.194.870
Konstruksi dalam pengerjaan	C.18	280.775.931	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.19	(3.215.102.510)	(2.852.455.997)
Jumlah Aset Tetap		27.212.523.063	27.002.258.436
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.20	-	-
Aset Lain-Lain	C.21	74.192.850	74.970.850
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.22	(74.192.850)	(74.970.850)
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		27.255.928.263	27.053.864.536
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.23	42.000.000	50.000.000
Utang kepada Pihak Ketiga	C.24	941.271.742	-
Pendapatan Diterima di Muka	C.25	-	-
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.26	44.810.004	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		1.028.081.746	50.000.000
JUMLAH KEWAJIBAN		1.028.081.746	50.000.000
EKUITAS			
Ekuitas	C.27	26.227.846.517	27.003.864.536
JUMLAH EKUITAS		26.227.846.517	27.003.864.536
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		27.255.928.263	27.053.864.536

III. LAPORAN OPERASIONAL

PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 JUNI 2022	2021
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	30.907.163	2.407.400
JUMLAH PENDAPATAN		30.907.163	2.407.400
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	3.955.281.389	3.559.886.244
Beban Persediaan	D.3	9.067.900	6.905.300
Beban Barang dan Jasa	D.4	697.911.276	537.208.108
Beban Pemeliharaan	D.5	266.150.368	256.950.491
Beban Perjalanan Dinas	D.6	27.768.500	23.795.000
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	189.955.090	184.444.674
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
Beban Lain-lain	D.11	-	-
JUMLAH BEBAN		5.146.134.523	4.569.189.817
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(5.115.227.360)	(4.566.782.417)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.12		
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional		1.171	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional		-	-
Jumlah		1.171	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(5.115.226.189)	(4.566.782.417)
POS LUAR BIASA	D.13		
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(5.115.226.189)	(4.566.782.417)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PENGADILAN AGAMATULUNGAGUNG LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 JUNI 2022	30 Juni 2021
EKUITAS AWAL	E.1	26.816.098.808	27.140.387.814
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(5.115.226.189)	(4.566.782.417)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKANN AKUNTANSI	E.3		
KOREKSI YANG MENANMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4		-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.5	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.6	-	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.7	-	-
SELISIH REVALUASI ASET	E.8	-	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.9	-	-
Jumlah Lain-Lain		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.10	4.526.973.898	4.430.259.139
KENAIKAN / PENURUNAN EKUITAS	E.11	(588.252.291)	(136.523.278)
EKUITAS AKHIR		26.227.846.517	27.003.864.536

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Tulungagung

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pengadilan Agama Tulungagung adalah Pengadilan Agama Tingkat Pertama Kelas 1A merupakan Yuridiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pengadilan Agama Tulungagung terletak di Jl. Ir. Soekarno Hatta No. 117 Tulungagung. Visi Pengadilan Agama Tulungagung adalah Visi Pengadilan Agama Tulungagung adalah Terwujudnya Pengadilan Agama Tulungagung yang Agung, dengan tetap memberi pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau, biaya rendah bagi masyarakat.

Misi Pengadilan Agama Tulungagung adalah :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan Hukum yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Mewujudkan efektifitas dalam pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Mewujudkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Tulungagung melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.
2. Meningkatkan Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel.

3. Meningkatkan penyelesaian perkara melalui mediasi.
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang peradilan.
5. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan internal yang efektif dan efisien.
6. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
7. Meningkatkan dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan Fungsi Peradilan.
8. Meningkatkan SDM yang professional dan berintegritas tinggi.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan per 30 Juni 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI dituangkan dalam Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dan dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas di mana 7 (tujuh) modul keuangan negara (Penganggaran, Komitmen, Pembayaran, Bendahara, Persediaan, Aset Tetap, dan Pelaporan) telah terintegrasi menjadi satu. Selanjutnya, SAKTI juga dirancang berdasarkan proses bisnis Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) terbaru untuk menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya

pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan per 30 Juni 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Tulungagung adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan(*Kementerian Negara/Lembaga agar menyesuaikan pengakuan Pendapatan-LO sesuai karakteristik pendapatan masing-masing entitas)
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak

kesenian.

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan

lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus

dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

*Penyusutan
Aset Tetap*

(9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber

sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 295/KM.06/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	4 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	10 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis Akrua
Pertama kali*

(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2020 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

Realisasi
Pendapatan Rp.
25.578.471,-

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir per 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp.25.578.471,- atau mencapai 212,76 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 12.022.000,- Pendapatan Pengadilan Agama Tulungagung terdiri dari Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2022		
	Anggaran	Realisasi Per 30 Juni 2022	% Real Angg.
Pendapatan Sewa	12.022.000	25.578.471	212,76
Pendapatan Lain-lain	-	-	-
Jumlah	12.022.000	25.578.471	212,76

Realisasi Pendapatan Sewa per 30 Juni 2022 mengalami kenaikan signifikan sebesar 6.178,47 persen dibandingkan TA 2021. Hal ini disebabkan karena peningkatan biaya sewa ATM dari Bank BRI dan Bank Jatim.

Perbandingan Realisasi Pendapatan Per 30 Juni 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI Per 30 Juni 2022	REALISASI T.A. 2021	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Sewa	25.578.471	407.400	6.178,47
Pendapatan Lain-lain	-	-	0,00
Jumlah	25.578.471	407.400	6.178

Realisasi Belanja
Negara Rp Rp.
4.552.552.369,-

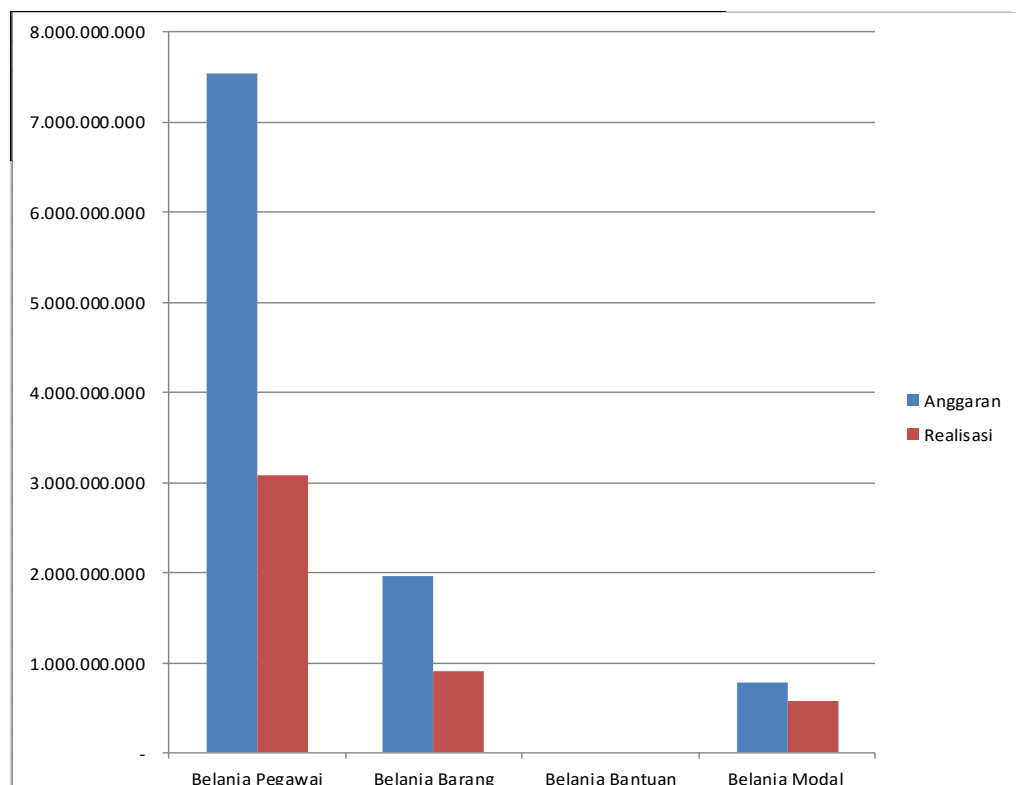
B.2. Belanja

Realisasi Belanja instansi per 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp.4.552.552.369,- atau sebesar 44,30 persen dari anggaran belanja sebesar Rp. 10.276.925.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja per 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja per 30 Juni 2022

URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 30 JUNI 2022	% Real Angg
Belanja Pegawai	7.540.509.000	3.074.153.647	40,77
Belanja Barang	1.960.416.000	906.622.791	46,25
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Belanja Modal	776.000.000	571.775.931	73,68
Total Belanja Kotor	10.276.925.000	4.552.552.369	44,30
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah	10.276.925.000	4.552.552.369	44,30

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini :



Realisasi Belanja per 30 Juni 2022 mengalami kenaikan sebesar 2,75 persen dibandingkan realisasi belanja pada Tahun 2021. Hal ini disebabkan karena peningkatan realisasi belanja barang dan belanja modal pada semester I TA 2022 karena terdapat pembangunan Gedung Ruang Tunggu dan Belanja Modal Peralatan Mesin untuk Personal Computer (P.C.) di Pengadilan Agama Tulungagung.

Perbandingan Realisasi Belanja Per per 30 Juni 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI Per 30 JUNI 2022	REALISASI TA 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	3.074.153.647	3.559.886.244	(13,64)
Belanja Barang	906.622.791	833.430.295	8,78
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Belanja Modal	571.775.931	37.350.000	1.430,86
Jumlah	4.552.552.369	4.430.666.539	2,75

*Belanja Pegawai Rp.
3.074.154.030,-*

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per 30 Juni 2022 dan Tahun 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 3.074.154.030,- dan Rp. 3.559.886.244,-. Realisasi belanja per 30 Juni 2022 mengalami penurunan sebesar 13,64 persen dari TA 2021. Hal ini disebabkan karena terdapat penurunan jumlah pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Tulungagung.

Perbandingan Belanja Pegawai Per 30 Juni 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI Per 30 JUNI 2022	REALISASI TA 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2.965.334.030	3.446.688.244	(13,97)
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	0	0	-
Belanja Honorarium	0	0	-
Belanja Lembur	0	0	-
Belanja Uang Makan	108.820.000	113.198.000	(3,87)
Jumlah Belanja Kotor	3.074.154.030	3.559.886.244	(13,64)
Pengembalian Belanja Pegawai	0	0	-
Jumlah Belanja	3.074.154.030	3.559.886.244	(13,64)

*Belanja Barang Rp.
906.622.791,-*

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per 30 Juni 2022 dan Tahun 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 906.622.791,- dan Rp. 833.430.295,-. Realisasi Belanja Barang per 30 Juni 2022 mengalami kenaikan sebesar 8,78 persen dari Realisasi Belanja Barang TA 2021. Hal ini antara lain disebabkan karena

peningkatan aktifitas belanja barang terutama Belanja Jasa di TA 2022.

Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI Per 30 JUNI 2022	REALISASI TA 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	417.893.300	436.505.960	(4,26)
Belanja Barang Non Operasional	3.360.000	14.192.700	(76,33)
Belanja Jasa	224.994.609	105.864.544	112,53
Belanja Pemeliharaan	233.306.382	253.072.091	(7,81)
Belanja Perjalanan	27.068.500	23.795.000	13,76
Jumlah Belanja Kotor	906.622.791	833.430.295	8,78
Pengembalian Belanja		-	-
Jumlah Belanja	906.622.791	833.430.295	8,78

*Belanja Bantuan
Sosial Rp. 0,-*

B.5 Belanja Bantuan Sosial

Tidak terdapat anggaran maupun aktifitas pada Belanja Bantuan Sosial Tahun 2022 dan Tahun 2021. Sehingga tidak ada realisasi per 30 Juni 2022 maupun TA 2021.

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial per 30 Juni 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI Per 30 JUNI 2022	REALISASI T.A 2021	NAIK (TURUN) %
Kelompok Pendidikan Jaya Maju	0	0	0,00
Kelompok Pendidikan Cenderawasih	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian	-	-	0,00
Jumlah Belanja	0	0	0,00

*Belanja Modal
Tanah Rp. 0,-*

B.6 Belanja Modal Tanah

Tidak terdapat anggaran maupun aktifitas pada Belanja Modal Tanah Tahun 2022 dan Tahun 2021. Sehingga tidak ada realisasi per 30 Juni 2022 maupun TA 2021.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal per 30 Juni 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI per 30 JUNI 2022	REALISASI T.A 2021	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0,00

*Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin Rp.
291.000.000,-*

B.7 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2022 dan Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 291.000.000,- dan Rp. 37.350.000,-. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2022 mengalami kenaikan sebesar 679,12 persen dari Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2021. Hal ini dikarenakan terdapat realisasi pengadaan Belanja Modal Pengadaan PC, Pengadaan Printer, dan Pengadaan Generator Set (Genset) yang dilaksanakan pada semester I tahun 2022.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Per 30 Juni 2022 dan 2021

URAIAN	Realisasi per 30 Juni 2022	Realisasi per 30 Juni 2021	NAIK (TURUN) %
CCTV	0	0	-
Pengadaan PC	81.000.000	37.350.000	116,87
Pengadaan Laptop	0	0	-
Pengadaan printer	10.000.000	0	-
Pengadaan router	0	-	-
Pengadaan Scanner	0	-	-
Pengadaan finger print	0	0	-
Pengadaan TV LED	0	0	-
Pengadaan UPS	0	0	-
Pengadaan ATR	0	0	-
Pengadaan Generator Set	200.000.000	0	-
Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Kantor	0	0	-
Jumlah Belanja Kotor	291.000.000	37.350.000	-
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	291.000.000	37.350.000	679,12

Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan Rp
280.775.931,-

B.8 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 2022 dan Tahun 2021 adalah sebesar Rp 280.775.931,- dan Rp 0,-. Terdapat Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk Pembangunan ruang tunggu di Pengadilan Agama Tulungagung di semester I TA 2022.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Per 30 Juni 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI Per 30 JUNI 2022	REALISASI T.A 2021	NAIK (TURUN) %
Gedung Tempat Kerja	280.775.931	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	280.775.931	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	280.775.931	0	0,00

Belanja Modal
Jalan, Irigasi, dan
Jaringan Rp. 0,-

B.9 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Tidak terdapat anggaran maupun aktifitas pada Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2022 dan Tahun 2021, Sehingga tidak ada realisasi per 30 Juni 2022 maupun TA 2021.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Per 30 Juni 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BELANJA	T.A. 2022	T.A 2021	Naik (Turun)
Belanja Modal Jaringan	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0,00

Belanja Modal
Lainnya Rp.0,-

B.10 Belanja Modal Lainnya

Tidak terdapat anggaran maupun aktifitas pada Belanja Modal Lainnya Tahun 2022 dan Tahun 2021, Sehingga tidak ada realisasi Per 30 Juni 2022 maupun TA 2021.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp. 42.000.000,-

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 42.000.000,- dan Rp. 50.000.000,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	PER 30 JUNI 2022	Tahun 2021
Bank BRI	-	-
Uang Tunai	42.000.000	50.000.000
Jumlah	42.000.000	50.000.000

Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp. 0,-

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebesar masing-masing Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

Keterangan	PER 30 JUNI 2022	Tahun 2021
Bank BRI	-	-
Uang Tunai	-	-
Jumlah	-	-

Kas Lainnya dan Setara
Kas Rp. 0,-

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

Jenis	PER 30 JUNI 2021	Tahun 2020
Jasa Giro yang belum disetor ke kas negara	-	0
Pajak PPh yang belum disetor	-	0
Honor kegiatan yang belum dibagikan	-	0
Pengembalian belanja belum disetor ke kas negara	-	0
Jumlah	-	-

Piutang Bukan Pajak
Rp. 0,-

C.4 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang PNPB per tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 135.800,- dan Rp. 0,-. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang Bukan Pajak

Uraian	PER 30 JUNI 2022	TA 2021
Piutang PNPB	135.800	-
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	135.800	-

Bagian Lancar Tagihan
TP/TGR
Rp. 0,-

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TP/TGR

No	Nama	Per 30 Juni 2022	TA 2021
1	Nihil	-	-
	Jumlah	-	-

Bagian Lancar TPA
Rp. 0,-

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- Bagian Lancar TPA merupakan TPA yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TPA

No	Nama	PER 30 JUNI 2022	TH 2021
1	NIHIL	-	-
Jumlah		-	-

Penyisihan Piutang Tak
Tertagih – Piutang
Jangka Pendek
Rp.0,-

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek per tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih- Jangka Pendek pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Jangka Pendek

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
Jumlah	-	-	-
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
Jumlah	-	-	-
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
Jumlah	-	-	-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

Belanja Dibayar di Muka
Rp. 0,-

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Belanja Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari belanja pegawai dibayar dimuka (prepaid) yang telah dibayarkan secara penuh. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Dibayar di Muka

Jenis	Per 30 Juni 2022	TH 2021
Persekot Gaji	-	-
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	-	-
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	-	-
Jumlah	-	-

Persediaan Rp.
1.269.400,-

C.9 Persediaan

Nilai Persediaan per tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 1.269.400,- dan Rp. 1.606.100,-. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Persediaan	Realisasi Per 30 Juni 2022	TH 2021
Barang Konsumsi	1.082.000	1.302.500
Bahan untuk Pemeliharaan	187.400	303.600
Suku Cadang	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	1.269.400	1.606.100

Semua jenis persediaan tersebut pada saat tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Tagihan TP/TGR
Rp. 0,-

C.10 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan

kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 30 Juni 2022 dan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan TP/TGR

No	Debitur	Per 30 Juni 2022	Tahun 2021
1	NIHIL	-	-
		-	-
Jumlah		-	-

TPA
Rp. 0,-

C.11 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp. 0,-. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan TP/TGR

No	Debitur	PER 30 JUNI 2022	TH 2021
1	NIHIL	-	-
		-	-
Jumlah		-	-

Penyisihan Piutang Tak
Tertagih – Piutang
Jangka Panjang
Rp. 0,-

C.12 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang TPA.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Jangka Panjang

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-	0,00%	-
Tagihan PA			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-	0,00%	-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

Tanah

Rp. 19.834.552.000,-

C.13 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Pengadilan Agama Tulungagung per tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp. 19.834.552.000,- dan Rp. 19.834.552.000,-. Nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	19.834.552.000
Mutasi tambah:	
Revaluasi Aset Tetap	0
Mutasi kurang:	
Penyitaan pengadilan	0
Saldo per tanggal 30 Juni 2022	19.834.552.000

Rincian saldo Tanah per tanggal 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	9.196 m2	Jl Ir. Soekarno Hatta No. 5, Tulungagung	18.362.737.000
2	724 m2	Jl. Pahlawan III No 1, Tulungagung	836.629.000
3	544 m2	Jl. Pahlawan III No 1, Tulungagung	635.186.000
Jumlah			19.834.552.000

Peralatan dan Mesin

Rp. 2.771.596.563,-

C.14 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 adalah Rp. 2.771.596.563,- dan Rp. 2.479.818.563,-. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	2.480.596.563
Mutasi tambah:	-
Pembelian	291.000.000
Mutasi kurang:	-
Saldo per 30 Juni 2022	2.771.596.563
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2022	(2.371.108.533)
Nilai Buku per 30 Juni 2022	400.488.030

Adanya mutasi transaksi penambahan maupun pengurangan peralatan dan mesin sampai dengan 30 Juni 2022.

*Gedung dan Bangunan
Rp. 7.085.960.000,-*

C.15 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah Rp. 7.085.960.000,- dan Rp. 7.085.960.000,- Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	7.085.960.000
Mutasi tambah:	
Revaluasi Nilai Aset Tetap	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 30 Juni 2022	7.085.960.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2022	(790.295.027)
Nilai Buku per 30 Juni 2022	6.295.664.973

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Jalan, Jaringan dan
Irigasi Rp. 449.189.000,-*

C.16 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 449.189.000,- dan Rp. 449.189.000,-. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan sehingga disajikan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	449.189.000
Mutasi tambah:	
Revaluasi Nilai Aset Tetap	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 30 Juni 2022	449.189.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2022	(53.698.950)
Nilai Buku Per 30 Juni 2022	395.490.050

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap Lainnya
Rp. 5.552.079,-

C.17 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah Rp. 5.552.079,- dan Rp. 5.194.870,-. Aset tetap tersebut berupa barang ekstrakomtabel dikarenakan barang tersebut mempunyai nilai harga dibawah nilai kapitalisasi. Terdapat mutasi tambah aset tetap ini Per 30 Juni 2022. Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Konstruksi Dalam
Pengerjaan
Rp.280.775.931,-

C.18 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 280.775.931,- dan Rp. 0,- Terdapat mutasi tambah atas aset tetap ini Per 30 Juni 2022 dikarenakan terdapat pembangunan ruang tunggu di Pengadilan Agama Tulungagung. Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi Penyusutan
aset Tetap Rp.
(3.215.102.510,-)

C.19 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing Rp. (3.215.102.510,-) dan Rp. (2.852.455.997,-). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	2.771.596.563	(2.371.108.533)	400.488.030
2	Gedung dan Bangunan	7.085.960.000	(790.295.027)	6.295.664.973
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	449.189.000	(53.698.950)	395.490.050
4	Aset Tetap Lainnya	5.552.079	0	0
Akumulasi Penyusutan		9.863.108.642	(3.215.102.510)	7.091.643.053

Aset Tak Berwujud Rp.
0,-

C.20 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Tidak ada Aset Tak Berwujud pada tanggal

pelaporan dan disajikan sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	-
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 30 Juni 2022	-
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2022	-
Nilai Buku per 30 Juni 2022	-

Rincian Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak berwujud

Uraian	Nilai
NIHIL	0
	0
Jumlah	0

*Aset Lain-Lain Rp.
74.192.850,-*

C.21 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah Rp. 74.192.850,- dan Rp. 74.970.850,-. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2021	74.192.850
Mutasi tambah:	
- reklasifikasi dari aset tetap	-
Mutasi kurang:	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
- penghapusan BMN	-
Saldo per 30 Juni 2022	74.192.850
Akumulasi Penyusutan	(74.192.850)
Nilai Buku per 30 Juni 2022	-

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Akumulasi Penyusutan
dan Amortisasi Aset
Lainnya Rp.(74.192.850)*

C.22 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing Rp. (74.192.850,-) dan Rp. (74.970.850,-). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	0	0	0
Aset Lain-lain	74.192.850	-74.192.850	0
Jumlah	74.192.850	-74.192.850	0

*Uang Muka dari KPPN
Rp. 42.000.000,-*

C.23 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp.42.000.000,- dan Rp50.000.000,-. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

*Utang kepada Pihak
Ketiga Rp. 0,-*

C.24 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	-	-
Belanja barang yang masih harus dibayar	-	-
Utang kepada Pihak ketiga lainnya	-	-
Total	-	

*Pendapatan Diterima di
Muka Rp. 0,-*

C.25 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 30 Juni 2022 dan 2021 sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Tidak ada Pendapatan Diterima di Muka pada pelaporan ini. Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga disajikan sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah
NIHIL	-
Total	-

Ekuitas Rp.

26.227.846.517,-

C.26 Ekuitas

Ekuitas per per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 26.227.846.517,- dan Rp. 27.003.864.536,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNPB
Rp. 30.907.163,-

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp. 30.907.163,- dan Rp. 2.407.400,-. Pendapatan tersebut terdiri dari :

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2022 dan 2021

URAIAN	PER 30 JUNI 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Sewa	30.907.163	2.407.400	1.183,84
Pendapatan Lain-lain	-	-	-
Jumlah	30.907.163	2.407.400	1.183,84

Pendapatan Sewa merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari pendapatan sewa tanah gedung dan bangunan.

Beban Pegawai Rp.
3.955.281.389,-

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 3.955.281.389,- dan Rp. 3.559.886.244,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai Per 30 Juni 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	Per 30 Juni 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	1.308.099.840	1.145.086.760	14,24
Beban Pembulatan Gaji PNS	18.383	14.597	25,94
Beban Tunjangan-Tunjangan	2.538.343.549	2.301.586.887	10,29
Beban Uang Makan	108.820.000	113.198.000	(3,87)
Beban Lembur	-	-	-
Jumlah	3.955.281.772	3.559.886.244	11,11

Beban Persediaan
Rp 9.067.900,-

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 9.067.900,- dan Rp. 6.905.300,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Per 30 Juni 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	PER 30 JUNI 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	9.067.900	6.905.300	31,32
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan		-	-
Beban Persediaan Suku Cadang	-	-	-
Beban Persediaan Lainnya	-	-	-
Jumlah Beban Persediaan	9.067.900	6.905.300	31,32

*Beban Barang dan
Jasa
Rp. 697.911.276,-*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 697.911.276,- dan Rp. 537.208.108,-. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Jasa Per 30 Juni 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	PER 30 JUNI 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Langganan Listrik	46.689.857	34.898.163	33,79
Beban Langganan Telepon	719.799	449.985	59,96
Beban Barang Keperluan perkantoran	546.468.000	391.370.000	39,63
Beban Jasa Pengiriman Surat Dinas	1.116.620	766.960	45,59
Beban Barang Operasional Lainnya	10.855.000	25.619.000	(57,63)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	20.700.000	18.750.000	0,00
Beban Sewa	66.740.000	62.370.000	0,00
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	4.622.000	2.984.000	0,00
Jumlah	697.911.276	537.208.108	29,91

*Beban
Pemeliharaan Rp.
266.150.368,-*

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 266.150.368,- dan Rp. 256.950.491,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan Per 30 Juni 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	PER 30 JUNI 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	183.449.880	165.383.350	10,92
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya		38.199.700	100,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	81.167.188	49.489.041	64,01
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	1.533.300	3.878.400	(60,47)
Jumlah	266.150.368	256.950.491	3,58

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan
Dinas Rp.
27.768.500,-

Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 27.768.500,- dan Rp. 23.795.000,-. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Per 30 Juni 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	Per 30 Juni 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	27.018.500	21.845.000	23,68
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	750.000	1.950.000	(61,54)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota		0	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota		0	-
Jumlah	27.768.500	23.795.000	16,70

Beban Barang
untuk Diserahkan
kepada Masyarakat
Rp. 0,-

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Per 30 Juni 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	PER 30 JUNI 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
NIHIL	0	-	-
	0	-	-
	0	-	-
Jumlah	0	-	-

Beban Bantuan
Sosial Rp. 0,-

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial per

30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial Per 30 Juni 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	PER 30 JUNI 2022	TH 2021	% NAIK (TURUN)
NIHIL	0	-	-
	0	-	-
	0	-	-
Jumlah	0	-	-

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp. 189.955.090,-

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 189.955.090,- dan Rp. 184.444.674,-. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 30 Juni 2022 dan 2021

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	PER 30 JUNI 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	95.612.990	90.102.574	6,12
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	88.375.550	88.375.550	-
Beban Penyusutan Jalan, dan jembatan	3.664.820	3.664.820	-
Beban Penyusutan irigasi	2.301.730	2.301.730	-
Jumlah Penyusutan	189.955.090	184.444.674	2,99
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-	-
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	189.955.090	184.444.674	2,99

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp. 0,-

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Tidak ada Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 30 Juni 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	PER 30 JUNI 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jk Pendek	0	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jk Panjang	0	-	-
Jumlah	0	-	-

*Beban Lain-lain
Rp.0,-*

D.11. Beban Lain-lain

Tidak terdapat jumlah Beban Lain-lain per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Lain-lain per 30 Juni 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	PER 30 JUNI 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Aset Extrakomtabel Peralatan dan Mesin	0	-	-
Beban Aset Extrakomtabel Gedung dan Bangunan	0	-	-
Beban Aset Extrakomtabel Aset Tetap Lainnya	0	-	-
Jumlah	0	-	-

*Surplus /Defisit dari
Kegiatan Non
Operasional Rp.
1.171,-*

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp. 1.171,- dan Rp 0,-. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional per 30 Juni 2022 dan 2021

URAIAN	PER 30 JUNI 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
Surplus / (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	-
Surplus/ (Defisit) Dari Kgt Non Operasional lainnya			
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	1.171	-	-
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	-	-	-
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	-	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	1.171	-	-

*Pos Luar Biasa
Rp.0,-*

D.13 Pos Luar Biasa

Tidak terdapat Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.

Rincian Pos Luar Biasa untuk per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa per 30 Juni 2022 dan 2021

URAIAN	PER 30 JUNI 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNB	0	-	-
Beban Perjalanan Dinas	0	-	-
Beban Persediaan	0	-	-
Jumlah	0	-	-

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal Rp.
26.816.098.808,-*

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 26.816.098.808,- dan Rp. 27.140.387.814,-

*Surplus (Defisit) LO
Rp.
(5.115.226.189,-)*

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp. (5.115.226.189,-) dan Rp. (4.566.782.417,-). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Dampak Kumulatif
Perubahan
Kebijakan
Akuntansi Rp. 0,-*

E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah Rp. 0.

*Koreksi Yang
Menambah/
Mengurangi Ekuitas
Rp.0,-*

E.4 Koreksi Yang Menambah/ Mengurangi Ekuitas

Koreksi Yang Menambah/ Mengurangi Ekuitas per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah Rp. 0,-

*Penyesuaian Nilai
Aset Rp. 0,-*

E.5 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah Rp. 0,-

*Koreksi Nilai
Persediaan Rp. 0,-*

E.6 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Tidak terdapat koreksi nilai persediaan per 30 Juni 2022 dan 2021. Rincian Koreksi Nilai Persediaan per 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	-
Suku Cadang	-
Barang Persediaan Lainnya	-
Jumlah	-

Koreksi Atas
Reklasifikasi Rp.0,-

E.7 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir per 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp. 0,-

Selisih Revaluasi
Aset Rp. 0,-

E.8 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir per 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp. 0,-

Koreksi Nilai Aset
Non Revaluasi
Rp. 0,-

E.9 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp. 0,-

Transaksi Antar
Entitas
Rp. 4.526.973.898,-

E.10 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas untuk per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing – masing sebesar Rp. 4.526.973.898,- dan Rp. 4.430.259.139,-. Rincian Koreksi Atas Pendapatan untuk per 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Atas Pendapatan

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan Ke Entitas Lain	4.552.552.369
Diterima Dari Entitas Lain	(25.578.471)
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	(588.252.291)
Jumlah	4.526.973.898

Ekuitas Akhir Rp.
26.227.846.517,-

E.11 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 26.227.846.517,- dan Rp. 27.003.864.536,-.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal Neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam Laporan Keuangan ini.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Tidak Ada.

Lampiran A1

Pengadilan Agama Tulungagung
Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/Amortisasi,
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi dan Nilai Buku Aset Tetap
Untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2022

No	Aset Tetap	Masa	Nilai Perolehan	Akm. Peny.	Beban Peny.	Tot. Akm. Peny.	Nilai Buku
		Manfaat		Per 30-06-2022	Per 30-06-2022	Per 30-06-2022	Per 30-06-2022
A	Tanah						
1	Tanah	-	19.834.552.000	-	-	-	19.834.552.000
	Jumlah		19.834.552.000	-	-	-	19.834.552.000
B	Peralatan dan Mesin						
1	Alat Bantu	10	200.000.000	-	-	-	200.000.000
2	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	521.211.703	521.211.703	-	521.211.703	-
3	Alat Kantor	5	157.308.400	139.375.800	15.982.600	155.358.400	1.950.000
4	Alat Rumah Tangga	5	677.343.120	600.903.620	55.949.500	656.853.120	20.490.000
5	Alat Studio	5	55.335.300	39.802.600	11.478.300	51.280.900	4.054.400
6	Alat Komunikasi	5	18.327.000	16.227.000	2.100.000	18.327.000	-
7	Komputer Unit	4	914.931.100	628.150.100	138.414.850	766.564.950	148.366.150
8	Peralatan Komputer	4	232.139.440	161.372.822	38.472.471	199.845.293	32.294.147
	Jumlah		2.776.596.063	2.107.043.645	262.397.721	2.369.441.366	407.154.697
C	Gedung dan Bangunan						
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	5.989.414.000	435.965.472	220.525.197	656.490.669	5.332.923.331
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	658.322.000	59.323.998	29.661.998	88.985.996	569.336.004
3	Tugu/Tanda Batas	50	438.224.000	29.878.908	14.939.454	44.818.362	393.405.638
	Jumlah		7.085.960.000	525.168.378	265.126.649	790.295.027	6.295.664.973
D	Jaringan						
	Jumlah						
E	Konstruksi Dalam Pengerjaan						
	Jumlah		0	-	-	-	-
F	Jalan dan Jembatan	50	304.180.000	21.988.920	10.994.460	32.983.380	271.196.620
	Jumlah		304.180.000	21.988.920	10.994.460	32.983.380	271.196.620
G	Irigasi	50	145.009.000	13.810.380	6.905.190	20.715.570	124.293.430
	Jumlah		145.009.000	13.810.380	6.905.190	20.715.570	124.293.430
H	Aset Tetap Lainnya						
1	Bahan Perpustakaan tercetak	0	5.552.079	-	-	-	5.552.079
	Jumlah		5.552.079	-	-	-	5.552.079
B	Peralatan dan Mesin						
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	1.200.000	1.200.000	-	1.200.000	-
2	Alat Kantor	5	7.306.000	7.306.000	-	7.306.000	-
3	Alat Rumah Tangga	5	2.917.000	2.917.000	-	2.917.000	-
4	Alat Studio	5	952.000	952.000	-	952.000	-
5	Alat Komunikasi	5	176.000	176.000	-	176.000	-
6	Komputer Unit	4	57.313.850	57.313.850	-	57.313.850	-
7	Peralatan Komputer	4	4.353.000	4.353.000	-	4.353.000	-
	Jumlah		74.217.850	74.217.850	-	74.217.850	-
Total			30.226.066.992	2.742.229.173	545.424.020	3.287.653.193	26.938.413.799

Pengadilan Agama Tulungagung

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2022

Jl. Ir. Soekarno Hatta No 117 Tulungagung - 66261



LAPORAN KEUANGAN

PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2022

BAGIAN ANGGARAN 005.04

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Ir. Soekarno - Hatta No.117

Telp. 0355-336516 Fax. 0355-336121

Tulungagung - Jawa Timur 66261

e-mail : pa.tulungagung@gmail.com

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2014, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Pengadilan Agama Tulungagung adalah salah satu Entitas Akuntansi dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Tulungagung mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, serta informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Tulungagung. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Tulungagung, 25 Juli 2022
Kuasa Pengguna Anggaran,

Airwie S.H.
NIP. 19670228 199303 1 003

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	17
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	19
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	20
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	26
VI. Lampiran dan Daftar	

PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Jl. Ir. Soekarno Hatta No. 117 Tulungagung – Jawa Timur 66261
Telp. 0355-336516 Fax.0355-336121 e-mail : pa.tulungagung@gmail.com

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Tulungagung yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 30 Juni 2022 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tulungagung, 25 Juli 2022
Kuasa Pengguna Anggaran,

Alwie, S.H.
NIP. 19701281993031003

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Tulungagung per 30 Juni 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2022

Realisasi Pendapatan Negara per 30 Juni 2022 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 162.101.000,- atau mencapai 44,02 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp. 368.246.000,-

Realisasi Belanja Negara per 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp. 92.046.000,- atau mencapai 39,60 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 232.440.000,-

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2022.

Nilai Aset per 30 Juni 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 17.653.093,- ; yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 17.653.093; Aset Tetap (neto) sebesar Rp.0; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp.0; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp. 0;. Nilai Kewajiban dan Ekuitas sebesar Rp. 9.325.893,-

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang

diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp. 162.101.000,- sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 98.681.277,- sehingga terdapat Surplus dari Kegiatan Operasional senilai Rp. 63.419.723,-. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp. 0,- ; dan defisit sebesar Rp. 0,- ; sehingga entitas mengalami Surplus-LO sebesar Rp. 63.419.723,-.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2022 adalah sebesar Rp. 15.961.170,- ditambah Surplus-LO sebesar Rp. 63.419.723,- kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 0; dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. (70.055.000); Kenaikan/penurunan Ekuitas Rp. (6.635.277),- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2022 adalah senilai Rp. 9.325.893,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2022 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2022		% thd Angg	TA 2021
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	368.246.000	162.101.000	44,02	169.855.000
JUMLAH PENDAPATAN		368.246.000	162.101.000	44,02	169.855.000
BELANJA	B.2.				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.3	-	-	0,00	-
Belanja Barang	B.4	232.440.000	92.046.000	39,60	85.080.000
Belanja Bantuan Sosial	B.5	-	-	0,00	-
Jumlah Belanja Operasi		232.440.000	92.046.000	39,60	85.080.000
Belanja Modal					
Belanja Tanah	B.6	-	-	0,00	-
Belanja Peralatan dan Mesin	B.7	-	-	0,00	-
Belanja Gedung dan Bangunan	B.8	-	-	0,00	-
Belanja Jalan, Irigasi, Jaringan	B.9	-	-	0,00	-
Belanja Modal lainnya	B.10	-	-	0,00	-
Jumlah Belanja Operasi		-	-	0,00	-
JUMLAH BELANJA		232.440.000	92.046.000	39,60	85.080.000

II. NERACA

PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG NERACA PER 30 JUNI 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2022	2021
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	5.500.000	800.000
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang PNPB	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Pendek	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Persediaan	C.9	12.153.093	17.078.000
Jumlah Aset Lancar		17.653.093	17.878.000
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.10	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.11	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.12	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.13	-	-
Peralatan dan Mesin	C.14	-	-
Gedung dan Bangunan	C.15	-	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.16	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.17	-	-
Konstruksi dalam pengerjaan	C.18	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.19	-	-
Jumlah Aset Tetap		-	-
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.20	-	-
Aset Lain-Lain	C.21	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.22	-	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		17.653.093	17.878.000
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.23	5.500.000	800.000
Utang kepada Pihak Ketiga	C.24	488.600	-
Pendapatan Diterima di Muka	C.25	-	-
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.26	2.338.600	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		8.327.200	800.000
JUMLAH KEWAJIBAN		8.327.200	800.000
EKUITAS			
Ekuitas	C.27	9.325.893	17.078.000
JUMLAH EKUITAS		9.325.893	17.078.000
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		17.653.093	17.878.000

III. LAPORAN OPERASIONAL

PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2022	2021
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	162.101.000	169.855.000
JUMLAH PENDAPATAN		162.101.000	169.855.000
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	-	-
Beban Persediaan	D.3	5.308.077	4.020.588
Beban Barang dan Jasa	D.4	47.477.200	48.500.000
Beban Pemeliharaan	D.5	-	-
Beban Perjalanan Dinas	D.6	45.896.000	36.580.000
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
Beban Lain-lain	D.11	-	-
JUMLAH BEBAN		98.681.277	89.100.588
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		63.419.723	80.754.412
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.12		
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		63.419.723	80.754.412
POS LUAR BIASA	D.13		
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		63.419.723	80.754.412

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PENGADILAN AGAMATULUNGAGUNG LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2022	2021
EKUITAS AWAL	E.1	15.961.170	14.973.816
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	63.419.723	80.754.412
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR LAIN-LAIN			-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3	-	-
KOREKSI ASET TETAP	E.4	-	-
KOREKSI ATAS BEBAN	E.5	-	-
KOREKSI ATAS PENDAPATAN	E.6	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN		-	-
Jumlah Lain-Lain		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.7	(70.055.000)	(84.775.000)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E. 8	(6.635.277)	(4.020.588)
EKUITAS AKHIR		9.325.893	10.953.228

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Tulungagung

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Visi Pengadilan Agama Tulungagung adalah Terwujudnya Kesatuan Hukum dan Aparatur Pengadilan Agama yang Profesional, Efektif, Efisien dan Akuntabel Menuju Badan Peradilan Indonesia yang Agung, dengan tetap memberi pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau, biaya rendah bagi masyarakat.

Misi Pengadilan Agama Tulungagung adalah :

1. Hukum dari masyarakat. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan.
3. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan.
4. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Tulungagung melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.
2. Meningkatkan Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel.
3. Meningkatkan penyelesaian perkara melalui mediasi.
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum di bidang peradilan.
5. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan internal yang efektif dan efisien.
6. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
7. Meningkatkan dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan Fungsi Peradilan.
8. Meningkatkan SDM yang profesional dan berintegritas tinggi.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan per 30 Juni 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur

manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI dituangkan dalam Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dan dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas di mana 7 (tujuh) modul keuangan negara (Penganggaran, Komitmen, Pembayaran, Bendahara, Persediaan, Aset Tetap, dan Pelaporan) telah terintegrasi menjadi satu. Selanjutnya, SAKTI juga dirancang berdasarkan proses bisnis Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) terbaru untuk menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Pengadilan Agama Tulungagung menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Agama Tulungagung dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang

digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan per 31 Desember 2017 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Tulungagung yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Agama Tulungagung. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Tulungagung adalah sebagai berikut :

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai

penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (duabelas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum

kapitalisasi sebagai berikut:

- a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 0.
- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 0.
- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

*PiutangJangkaP
anjang*

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak

langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

(9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 295/KM.06/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan MasaManfaatAsetTetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	4 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	10 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2018 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi
Pendapatan
Rp.
162.101.000,-

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp. 162.101.000,- atau mencapai 44,02 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 368.246.000,- Pendapatan Pengadilan Agama Tulungagung terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Pendapatan Lain-lain. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2022		
	Anggaran	Realisasi Per 30 Juni 2022	% Real Angg.
Penerimaan Negara Bukan Pajak	368.246.000	162.101.000	44,02
Pendapatan Lain-lain	-	-	-
Jumlah	368.246.000	162.101.000	44,02

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak per 30 Juni 2022 mengalami penurunan sebesar 4,57 persen dibandingkan TA 2021. Hal ini disebabkan karena realisasi pendapatan negara bukan pajak yang berasal dari biaya perkara turun berdasarkan PP No. 5 Tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas jenis PNPB yang berlaku di lingkungan Mahkamah Agung R.I.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI Per 30 Juni 2022	REALISASI T.A. 2021	NAIK (TURUN) %
Penerimaan Negara Bukan Pajak	162.101.000	169.855.000	(04,57)
Pendapatan Lain-lain	-	-	-
Jumlah	162.101.000	169.855.000	(04,57)

Realisasi
Belanja Negara
Rp.
92.046.000,-

B.2. Belanja

Realisasi Belanja Negara pada 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp 92.046.000,- atau 39,60 persen dari Anggaran belanja sebesar Rp. 232.440.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja per 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja TA 2022

URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	% Real Angg
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	232.440.000	92.046.000	39,60
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Belanja Modal	-	-	-
Jumlah	232.440.000	92.046.000	39,60

Dibandingkan dengan TA 2021, Realisasi Belanja per 30 Juni 2022 mengalami kenaikan 8,91 persen dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan aktivitas belanja barang pada semester I Tahun Anggaran 2022.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	92.046.000	85.080.000	8,19
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Belanja Modal	-	-	-
Jumlah	92.046.000	85.080.000	8,19

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp. 5.500.000,-

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 5.500.000,- dan Rp. 800.000,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	TH 2022	2021
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.500.000	800.000
	-	-
Jumlah	5.500.000	800.000

Uang Muka dari KPPN
Rp. 5.500.000,-

C.2 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp. 5.500.000,- dan Rp. 800.000. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kejadian masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

Keterangan	TH 2022	2021
Uang Muka dari KPPN	5.500.000	800.000
	-	-
Jumlah	5.500.000	800.000

Persediaan
Rp. 12.153.093,-

C.3 Persediaan

Nilai Persediaan per tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 12.153.093,- dan Rp. 10.953.228,-

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Persediaan	TH 2022	TH 2021
Barang Konsumsi	12.153.093	10.953.228
Bahan untuk Pemeliharaan	-	-
Suku Cadang	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	12.153.093	10.953.228

Semua jenis persediaan tersebut pada saat tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan

PNBP

Rp. 162.101.000,-

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp. 162.101.000,- dan Rp. 169.885.000,- Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2022 dan 2021

URAIAN	TH 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Negara Bukan Pajak	162.101.000	169.855.000	(4,57)
Pendapatan Lain-lain	-	-	-
Jumlah	162.101.000	169.855.000	(4,57)

Pendapatan Negara Bukan Pajak merupakan Pendapatan-LO dari pendapatan Hak-Hak Kepaniteraan yang diperoleh dari pelayanan perkara. Sedangkan Pendapatan Lain-Lain-LO merupakan pengembalian belanja pegawai dan belanja lainnya yang berasal dari transaksi tahun 2022. Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak per 30 Juni 2022 mengalami penurunan sebesar 4,57 persen dibandingkan TA 2021. Hal ini disebabkan karena realisasi pendapatan negara bukan pajak yang berasal dari biaya perkara bertambah berdasarkan PP No. 5 Tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBPN yang berlaku di lingkungan Mahkamah Agung R.I.

Beban Pegawai

Rp 0

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai Tahun 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	-	-	-
Beban Tunjangan-Tunjangan	-	-	-
Beban Honorarium dan Vakasi	-	-	-
Beban Lembur	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Beban
Persediaan Rp
5.308.077,-

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 5.308.077,- dan Rp. 4.020.588,- Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahun 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	5.308.077	4.020.588	32,02
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	0	-	-
Beban Persediaan Suku Cadang	-	-	-
Beban Persediaan Lainnya	-	-	-
Jumlah Beban Persediaan	5.308.077	4.020.588	32,02

Beban Barang
dan Jasa Rp.
47.477.200,-

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 47.477.200,- dan Rp. 48.500.000,-. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dan beban barang operasional lainnya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Jasa Tahun 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Bahan	977.200	-	-
Beban Barang Non Operasional Lainnya	-	4.400.000	(100,00)
Beban Jasa Konsultan	44.100.000	44.100.000	-
Beban sewa	2.400.000	0	-
Beban Jasa Lainnya	-	-	-
Jumlah	47.477.200	48.500.000	(2,11)

Dibandingkan dengan TA 2021 Beban Barang dan Jasa per 30 Juni 2022 mengalami penurunan sebesar 2,11 persen dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan terdapat tidak terdapat belanja barang non operasional pada realisasi 2022.

Beban
Pemeliharaan Rp
0

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Rincian beban pemeliharaan per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	-	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	-	-	-
Beban Pemeliharaan Lainnya	-	-	-
Jumlah		-	-

*Beban Perjalanan
Dinas Rp.
45.896.000,-*

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 45.896.000,- dan Rp. 36.580.000,-. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	3.196.000		0,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	40.840.000	36.580.000	11,65
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota		-	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.860.000	-	-
Jumlah	45.896.000	36.580.000	25,47

Dibandingkan dengan TA 2021, Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2022 mengalami kenaikan sebesar 25,47 persen dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya dikarenakan terdapat peningkatan pelaksanaan aktivitas perjalanan dinas dilaksanakan pada semester I 2022.

*Beban Barang
untuk Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp 0*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	-	-
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	-	-
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	-	-
Jumlah	-	-	-

*Beban Bantuan
Sosial Rp 0*

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial Tahun 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2022	TH 2021	% NAIK (TURUN)
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	0	-	-
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	0	-	-
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	0	-	-
Jumlah	0	-	-

*Beban
Penyusutan dan
Amortisasi Rp 0*

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2022 dan 2021

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	-	-	-
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	-	-
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	-	-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Jumlah Penyusutan	-	-	-
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-	-
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	-	-	-

Beban Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp 0

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2022	TH 2021	NAIK (TURUN)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jk Pendek	0	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jk Panjang	0	-	-
Jumlah	0	-	-

Beban Lain-lain
Rp 0

D.11. Beban Lain-lain

Jumlah Beban Lain-lain per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Lain-lain Tahun 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Aset Extrakomtabel Peralatan dan Mesin	0	-	-
Beban Aset Extrakomtabel Gedung dan Bangunan	0	-	-
Beban Aset Extrakomtabel Aset Tetap Lainnya	0	-	-
Jumlah	0	-	-

Surplus /Defisit
dari Kegiatan Non
Operasional Rp 0

D.12. Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional Tahun 2022 dan 2021

URAIAN	TH 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional lainnya			
Pendapatan penyesuaian Nilai Persediaan	0	-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar			
Penjualan Alat Kantor	0	-	-
Defisit Selisih Kurs	0	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	0	-	100,00

Pos Luar Biasa

Rp.0

D.13. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2022 dan 2021

URAIAN	TH 2022	TH 2021	NAIK (TURUN)
Pendapatan PNB	0	0	-
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0,00
Beban Persediaan	0	0	0,00
Jumlah	0	0	0,00

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal Rp.
15.961.170,-*

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 15.961.170,- dan Rp. 14.973.816,-.

*Surplus LO
Rp 63.419.723*

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp. 63.419.723,- dan Rp. 80.754.412,-. Surplus LO merupakan selisih lebih antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Koreksi Nilai
Persediaan Rp 0*

E.3 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan per 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	-
Suku Cadang	-
Barang Persediaan Lainnya	-
Jumlah	-

*Koreksi Aset Tetap
Rp. 0*

E.4 Koreksi Aset Tetap

Koreksi Atas Nilai Perolehan Aset Tetap merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Nilai koreksi nilai Aset Tetap adalah koreksi nilai Gedung dan Bangunan.

*Koreksi Atas Beban
Rp0*

E.5 Koreksi Atas Beban

Koreksi Atas Beban merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan beban yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Beban per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Rincian Koreksi Atas Beban per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Atas Beban

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Beban Pegawai	-
Beban Jasa	-
Jumlah	-

*Koreksi Atas
Pendapatan Rp0*

E.6 Koreksi Atas Pendapatan

Koreksi Atas Pendapatan merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Pendapatan per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp 0. Rincian Koreksi Atas Pendapatan per 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Atas Pendapatan

Jenis Pendapatan	Koreksi
Pendapatan Jasa Pelatihan	-
Pendapatan Lainnya	-
Jumlah	-

*Transaksi Antar
Entitas Rp.
(70.055.000),-*

E.7 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. (70.055.000),- dan Rp. (84.775.000),-

*Kenaikan /
penurunan Ekuitas
Rp. (6.635.277)*

E.8 Kenaikan / Penurunan Ekuitas

Kenaikan / Penurunan Ekuitas per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. (6.635.277),- dan Rp. (4.020.588),-

*Ekuitas Akhir Rp.
9.325.893*

E.9 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 9.325.893,- dan Rp. 10.953.228,-